



FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PEKANBARU

FACTORS THAT AFFECT THE QUALITY OF THE FINANCIAL STATEMENTS OF THE CITY GOVERNMENT PEKANBARU

Siska Maydiyanti¹, Annie Mustika Putri², Della Hilia Anriva³

¹²³Universitas Muhammadiyah Riau, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Pekanbaru
e-mail (responden): *annemustika@umri.ac.id

Article Info

Article history:

Received: Januari 2020

Accepted: April 2020

Published: Juni 2020

Keywords:

*financial reports,
accounting standards,
internal control*

JEL Classification:

G0 dan N2

Abstract

This research was conducted to determine the factors that influence the quality of local government financial reports. The data collection in this study used a questionnaire survey. The statistical method used to test hypotheses is multiple linear regression analysis. The results of hypothesis testing are the application of government accounting standards, the application of regional financial accounting systems, and the application of government internal control systems have a positive and significant effect on the quality of local government financial reports. While the use of information technology and human resource competencies do not affect the quality of local government financial reports.

Penelitian ini dilakukan untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan survei kuesioner. Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis regresi linear berganda. Hasil pengujian hipotesis adalah penerapan standar akuntansi pemerintah, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, dan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan pemanfaatan teknologi informasi dan kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

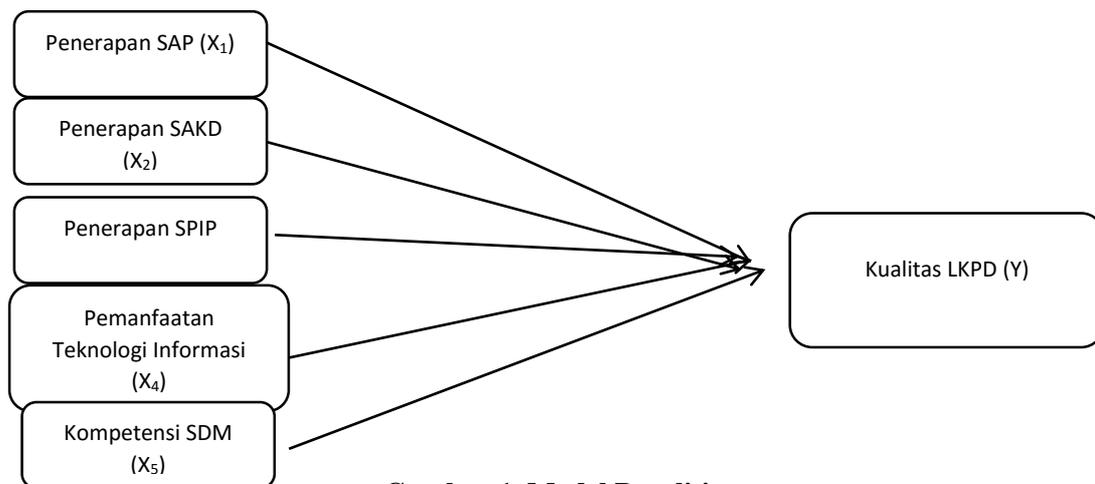
PENDAHULUAN

Pemerintah merupakan entitas pelapor (*reporting entity*) yang harus membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawabannya. Salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat tercermin dari hasil pemeriksaan BPK. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapat penilaian berupa opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2017, BPK RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Walau sudah memperoleh opini WTP, laporan keuangan pemerintah daerah Kota Pekanbaru masih terdapat catatan dari BPK, diantaranya Penatausahaan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Tidak Tertib, terutama pada objek pajak yang potensinya tinggi untuk PAD, seperti pajak parkir, hotel, tempat hiburan, restoran dan rumah makan; dan Aset tetap Pemerintah Kota Pekanbaru pada Neraca per 31 Desember 2017 belum disajikan secara lengkap dan akurat (Tribunnews.com, 2018). Kualitas laporan keuangan pemerintah berhubungan erat dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) karena laporan keuangan yang berkualitas harus disusun sesuai dengan pedoman dan aturan-aturan yang terdapat dalam standar akuntansi yang berlaku, oleh karena itu LKPD haruslah mengacu kepada SAP yang telah ditetapkan (Nurhasanah, Firmansyah, 2018). Pada penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh BPK, salah satu masalah yang perlu diperhatikan adalah tentang Sistem Pengendalian Intern (SPI). Lemahnya SPI yang diterapkan di pemerintahan, membuka peluang yang sangat besar terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran (APBN/APBD) hal ini dinyatakan oleh lembaga pemantau Pemerintah kemudian menerbitkan PP No. 60 Tahun 2008 tentang standar pengendalian internal pemerintahan (Syukriy, 2008).

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka penulis tertarik melakukan penelitian dan mengangkat permasalahan dengan judul penelitian **“Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah”**.

Dari penjelasan di atas maka model penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Model Penelitian

Hipotesis yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah:

- H₁ : Penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
- H₂ : Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
- H₃ : Penerapan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
- H₄ : Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
- H₅ : Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

METODE PENELITIAN

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Kriteria pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah Staf/pegawai yang melaksanakan fungsi akuntansi/ tata usaha keuangan di masing-masing Dinas pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Staf/pegawai OPD yang memiliki latar belakang pendidikan minimal Diploma. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) analisis deskriptif; (2) uji kualitas data yang meliputi: uji validitas dan uji reliabilitas; (3) uji asumsi klasik yang terdiri dari: uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas; (4) uji pengaruh yang meliputi: analisis linear berganda dan analisis koefisien determinasi (R^2); (5) uji hipotesis yang meliputi: uji t.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Validitas

Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membandingkan nilai korelasi *Pearson Product Moment* atau r hitung dengan nilai r tabel. Nilai r tabel dengan derajat bebas sebesar $n - 2 = 74 - 2 = 72$ dan pada taraf signifikansi 0,05 (uji 2 sisi) adalah 0,2072. Hasil uji validitas dalam penelitian ini untuk variabel Y atau Kualitas Laporan Keuangandapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Hasil Uji Validitas Kualitas Laporan Keuangan

Item	Pearson Correlation	r-Tabel	Hasil
KLK 1	0,733	0,229	Valid
KLK 2	0,736	0,229	Valid
KLK 3	0,778	0,229	Valid
KLK 4	0,748	0,229	Valid
KLK 5	0,679	0,229	Valid
KLK 6	0,854	0,229	Valid
KLK 7	0,861	0,229	Valid
KLK 8	0,651	0,229	Valid

Sumber: Data Olahan, 2019

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan dalam variabel Kualitas Laporan Keuangansudah valid karena nilai r_{hitung} lebih besar dari nilai r_{tabel} .

Hasil uji validitas dalam penelitian ini untuk variabel X₁ atau standar akuntansi pemerintah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Standar Akuntansi Pemerintah

Item	Pearson Correlation	r-Tabel	Hasil
SAP 1	0,677	0,229	Valid
SAP 2	0,540	0,229	Valid
SAP 3	0,860	0,229	Valid
SAP 4	0,859	0,229	Valid
SAP 5	0,752	0,229	Valid
SAP 6	0,828	0,229	Valid
SAP 7	0,826	0,229	Valid
SAP 8	0,816	0,229	Valid
SAP 9	0,864	0,229	Valid
SAP 10	0,700	0,229	Valid

Sumber: Data Olahan, 2019

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan dalam variabel standar akuntansi pemerintah sudah valid karena nilai r_{hitung} lebih besar dari nilai r_{tabel} .

Hasil uji validitas dalam penelitian ini untuk variabel X_2 atau sistem akuntansi keuangan daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Item	Pearson Correlation	r-Tabel	Hasil
SAKD 1	0,811	0,229	Valid
SAKD 2	0,787	0,229	Valid
SAKD 3	0,846	0,229	Valid
SAKD 4	0,836	0,229	Valid
SAKD 5	0,749	0,229	Valid
SAKD 6	0,827	0,229	Valid
SAKD 7	0,846	0,229	Valid
SAKD 8	0,819	0,229	Valid

Sumber: Data Olahan, 2019

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan dalam variabel sistem akuntansi keuangan daerah sudah valid karena nilai r_{hitung} lebih besar dari nilai r_{tabel} .

Hasil uji validitas dalam penelitian ini untuk variabel X_3 atau sistem pengendalian intern pemerintah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Hasil Uji Validitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Item	Pearson Correlation	r-Tabel	Hasil
SPIP 1	0,805	0,229	Valid
SPIP 2	0,804	0,229	Valid
SPIP 3	0,787	0,229	Valid
SPIP 4	0,827	0,229	Valid
SPIP 5	0,696	0,229	Valid

Sumber: Data Olahan, 2019

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan dalam variabel sistem pengendalian intern pemerintah sudah valid karena nilai r_{hitung} lebih besar dari nilai r_{tabel} .

Hasil uji validitas dalam penelitian ini untuk variabel X_4 atau pemanfaatan teknologi informasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Hasil Uji Validitas Pemanfaatan Teknologi Informasi

Item	Pearson Correlation	r-Tabel	Hasil
PTI 1	0,768	0,229	Valid
PTI 2	0,881	0,229	Valid
PTI 3	0,798	0,229	Valid
PTI 4	0,905	0,229	Valid
PTI 5	0,871	0,229	Valid
PTI 6	0,877	0,229	Valid

Sumber: Data Olahan, 2019

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan dalam variabel pemanfaatan teknologi informasi sudah valid karena nilai r_{hitung} lebih besar dari nilai r_{tabel} .

Hasil uji validitas dalam penelitian ini untuk variabel X_4 atau kompetensi sumber daya manusia dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. Hasil Uji Validitas Kompetensi Sumber Daya Manusia

Item	Pearson Correlation	r-Tabel	Hasil
KSDM 1	0,303	0,229	Valid
KSDM 2	0,845	0,229	Valid
KSDM 3	0,884	0,229	Valid
KSDM 4	0,894	0,229	Valid
KSDM 5	0,883	0,229	Valid
KSDM 6	0,908	0,229	Valid
KSDM 7	0,907	0,229	Valid

Sumber: Data Olahan, 2019

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan dalam variabel kompetensi sumber daya manusia sudah valid karena nilai r_{hitung} lebih besar dari nilai r_{tabel} .

Hasil Uji Reliabilitas

Tabel 7. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Batas Nilai	Kesimpulan
Kualitas Laporan Keuangan	0,886	0,60	Reliabel
Standar Akuntansi Pemerintah	0,918	0,60	Reliabel
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	0,927	0,60	Reliabel
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	0,808	0,60	Reliabel
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,922	0,60	Reliabel
Kompetensi Sumber Daya Manusia	0,902	0,60	Reliabel

Sumber: Data Olahan SPSS

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian ini sudah reliabel karena nilai *Alpha Cronbach* masing-masing variabel lebih besar dari 0,6.

Hasil Uji Asumsi

Hasil Uji Normalitas

Hasil dengan menggunakan tabel *Kolmogorov-Smirnov* bisa dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 8. Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		74
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,64405380
Most Extreme Differences	Absolute	,090
	Positive	,090
	Negative	-,090
Test Statistic Kolmogorov-Smirnov Z		,090
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Data Olahan, 2019

Berdasarkan uji normalitas dengan kolmogrov-Smirnov Test diperoleh nilai Kolmogrov-Smirnov Z sebesar 0,090 dan Asymp.Sig 0,200 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal.

Hasil Uji Multikolinearitas

Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9. Hasil Uji Multikolinearitas

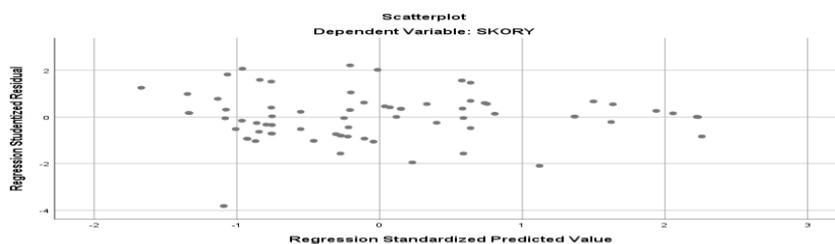
Variabel Independen	Variabel Dependen	Collinerity Statistics	
		Tolerance	VIF
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah		0,633	1,579
Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah		0,555	1,801
Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan	Kualitas Laporan Keuangan	0,657	1,523
Pemanfaatan Teknologi Informasi		0,413	2,422
Kompetensi Sumber Daya Manusia		0,526	1,900

Sumber: Data Primer yang diolah, 2019

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai *tolerance* tidak ada yang lebih kecil dari 0,10. Sedangkan VIF yang tertera pada tabel menunjukkan nilai yang lebih jauh kecil dari 10. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinieritas antara variabel independen dalam model regresi.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Pendeteksian ada atau tidaknya heterokedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada atau tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara nilai prediksi variable terikat (ZPRED) dengan nilai residualnya (SRESID). Jika ada pola tertentu yang teratur, maka mengindikasikan telah terjadi heterokedastisitas. Namun jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas. Berikut ini gambar grafik *scatterplot* yang menunjukkan hasil uji heterokedastisitas:



Gambar 2. Hasil Uji Heterokedastisitas

Memperlihatkan bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas sehingga model regresi layak untuk melihat kualitas laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan masukan variabel independen penerapan standar akuntansi pemerintah, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, penerapan sistem pengendalian intern pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, dan kompetensi sumber daya manusia.

Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Hasil uji regresi linier berganda dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 10 Tabel Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a					
Model	Unstandardize d Beta	Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients		Sig.
			Beta	t	
(Constan)	4,631	4,309		1,075	,286
SAP x ₁	,203	,093	,249	2,193	,032
SAKD x ₂	,488	,134	,442	3,649	,001
SPIP x ₃	,348	,168	,231	2,073	,042
PTI x ₄	-,086	,183	-,066	-,472	,639
KSDM x ₅	-,012	,147	-,010	-,083	,934

Berdasarkan uji regresi linear berganda yang diolah dengan bantuan program SPSS versi 20, maka dapat diperoleh hasil perhitungan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 4,631 + 0,203x_1 + 0,288x_2 + 0,348x_3 + -0,086x_4 + -0,012x_5$$

Persamaan regresi di atas diperoleh dari hasil perhitungan SPSS. Persamaan regresi tersebut memiliki makna:

1. Konstanta sebesar 4,631 menyatakan bahwa tanpa ada pengaruh dari kelima variabel independen dan factor lain, maka variabel kualitas laporan keuangan (Y) pada organisasi perangkat daerah adalah 4,632.
2. Koefisien regresi variabel penerapan standar akuntansi pemerintah (X_1) 0,203. Hal ini berarti bahwa setiap terjadi perubahan penerapan SAP akan meningkatkan kualitas laporan keuangan sebesar 0,203 atau sebesar 20,3% tanpa dipengaruhi factor lain.
3. Koefisien regresi penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (X_2) 0,488. Hal ini berarti bahwa setiap terjadi perubahan penerapan SAKD akan meningkatkan kualitas laporan keuangan sebesar 0,488 atau sebesar 48,8% tanpa dipengaruhi faktor lainnya.
4. Koefisien regresi penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (X_3) 0,348. Hal ini berarti bahwa setiap terjadi perubahan penerapan SPIP akan meningkatkan kualitas laporan keuangan sebesar 0,348 atau sebesar 34,8% tanpa dipengaruhi factor lainnya.
5. Koefisien regresi pemanfaatan teknologi informasi (X_4) -0,086. Hal ini berarti bahwa setiap terjadi kenaikan terhadap pemanfaatan TI akan meningkatkan kualitas laporan keuangan sebesar -0,086 atau sebesar -0,86% tanpa dipengaruhi factor lainnya.
6. Koefisien regresi kompetensi sumber daya manusia (X_5) -0,012. Hal ini berarti bahwa setiap terjadi kenaikan terhadap kompetensi SDM akan meningkatkan kualitas laporan keuangan sebesar -0,012 atau sebesar -0,12% tanpa dipengaruhi factor lainnya.

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 11. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,668 ^a	,446	,405	2,740

Sumber: Data Primer yang diolah, 2019

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai Adjusted R² sebesar 0,405 atau sebesar 40,5%. Hal ini berarti variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dapat dijelaskan oleh variabel variabel Standar Akuntansi Pemerintah, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia. Sedangkan sisanya sebesar 59,5% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Hasil Uji Hipotesis

Hasil Uji t

Berdasarkan hasil pengujian parsial dengan uji t pada Tabel , dapat dinyatakan bahwa:

1. Variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atau H1 diterima. Hal ini dapat diketahui nilai t hitung sebesar 2,193 dimana nilai t hitung > t table (2,193 > 1,995), maka H1 diterima, artinya secara parsial ada pengaruh signifikan antara Penerapan SAP terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Variabel Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atau H2 diterima. Hal ini dapat diketahui nilai t hitung sebesar 3,649 dimana nilai t hitung > t table (3,649 > 1,995), maka H1 diterima,

artinya secara parsial ada pengaruh signifikan antara Penerapan SAKD terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

3. Variabel Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atau H3 diterima. Hal ini dapat diketahui nilai t hitung sebesar 2,073 dimana nilai t hitung $>$ t table ($2,073 > 1,995$), maka H1 diterima, artinya secara parsial ada pengaruh signifikan antara Penerapan SPIP terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
4. Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atau H4 ditolak. Hal ini dapat diketahui nilai t hitung sebesar -0,472 dimana nilai t hitung $<$ t table ($-0,472 < 1,995$), maka H1 ditolak, artinya secara parsial tidak ada pengaruh signifikan antara Pemanfaatan TI terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
5. Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atau H4 ditolak. Hal ini dapat diketahui nilai t hitung sebesar -0,083 dimana nilai t hitung $<$ t table ($-0,083 < 1,995$), maka H1 ditolak, artinya secara parsial tidak ada pengaruh signifikan antara Kompetensi SDM terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pembahasan

Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Pegawai pada OPD Kota Pekanbaru

Hasil pengolahan data menggunakan SPSS nilai variabel komitmen organisasi memiliki signifikansi sebesar 0,015 atau lebih kecil dari 0,05. Hal ini memberikan arti bahwa H1 diterima, sehingga dapat dikatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya Komitmen organisasi yang ada pada suatu instansi pemerintah maka akuntabilitas kinerja dapat dicapai. Komitmen organisasi merupakan rasa identifikasi, keterlibatan, dan loyalitas yang dinyatakan oleh seorang pegawai terhadap organisasinya (Silvia, 2013). Tingkat tinggi rendahnya komitmen organisasi yang dimiliki oleh seorang pegawai sangat mempengaruhi bagaimana kinerja pegawai tersebut dalam instansi.

Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Pegawai pada OPD Kota Pekanbaru

Hasil pengolahan data menggunakan SPSS nilai variabel kapasitas sumber daya manusia memiliki signifikansi sebesar 0,032 atau lebih kecil dari 0,05. Hal ini memberikan arti bahwa H2 diterima, sehingga dapat dikatakan bahwa budaya organisasi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik budaya organisasi maka semakin baik akuntabilitas kinerja. Budaya organisasi sangat mempengaruhi kinerja sebuah organisasi, dengan adanya budaya organisasi akan memudahkan pegawai dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja dan membantu pegawai untuk mengetahui tindakan yang dilakukan sesuai dengan nilai-nilai yang ada didalam instansi (Rangkuti, 2018). Jika nilai-nilai budaya telah menjadi pedoman dalam pembuatan aturan organisasi, maka budaya perusahaan akan mampu memberikan kontribusi terhadap kinerja organisasi.

Pengaruh Pelatihan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pegawai pada OPD Kota Pekanbaru

Hasil pengolahan data menggunakan SPSS nilai variabel pelatihan memiliki signifikansi sebesar 0,048 atau lebih kecil dari 0,05. Hal ini memberikan arti bahwa H3 diterima, sehingga dapat dikatakan bahwa pelatihan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pelatihan maka semakin baik akuntabilitas kinerja. Pelatihan merupakan hal yang paling penting dari semua pegawai, sebab dengan adanya pelatihan akan meningkatkan nilai tambah dan bahkan dapat lebih produktif dalam menangani pekerjaan, sehingga dalam melakukan pelatihan diperlukan program pelatihan. Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PPBK) merupakan salah satu pendekatan pembinaan SDM yang diperlukan dengan berfokus pada pemenuhan atas pekerjaan, standar yang telah ditetapkan dan menggunakan waktu pendidikan dan pelatihan yang bervariasi dalam memberikan hasil sesuai dengan standar.

Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pegawai pada OPD Kota Pekanbaru

Hasil pengolahan data menggunakan SPSS nilai variabel gaya kepemimpinan memiliki signifikansi sebesar 0,002 atau lebih kecil dari 0,05. Hal ini memberikan arti bahwa H4 diterima, sehingga dapat dikatakan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik gaya kepemimpinan maka semakin baik akuntabilitas. Gaya kepemimpinan yang efektif menekankan peran pemimpin dalam mengatur pegawai atau bawahan agar bekerja semaksimal mungkin guna untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Seorang pemimpin juga memberikan motivasi sehingga dapat mengurangi hambatan dalam pencapaian tujuan, memberikan panduan dan dukungan yang dibutuhkan oleh para pegawai, serta memberikan penghargaan terhadap pencapaian tujuan yang telah diraih. Bawahan sebagai unsur penting yang terlibat dalam pencapaian tujuan mempunyai perbedaan dalam hal kemampuan, kebutuhan dan kepribadian, sehingga pendekatan yang dilakukan pemimpin disesuaikan dengan tingkat kematangan bawahan. Yang mana tingkat kematangan bawahan dan situasi tempat sangat berpengaruh terhadap gaya kepemimpinan yang diterapkan (Wahyudi, 2017).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dibuat beberapa kesimpulan yakni:

1. Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Pegawai.
2. Budaya Organisasi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Pegawai.
3. Pelatihan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Pegawai.
4. Gaya Kepemimpinan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Pegawai

SARAN

Beberapa saran yang dapat diberikan terkait penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah obyek penelitian, yaitu menambah beberapa daerah penelitian sehingga seluruh OPD kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Riau bisa diteliti.
2. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan menambahkan variabel lain yang dapat mempengaruhi akuntabilitas kinerja yaitu dengan menambahkan variabel otoritas pengambilan keputusan dan good governance.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, S., Karmizi., Enni, S. 2014. Pengaruh Good Governance, Gaya Kepemimpinan, Komitmen Organisasi, dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *JOM FEKON*, Vol.1 No.2.
- Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia. 2003. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LAN. Jakarta.**
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Moehariono. 2012. *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Ohorella, R. W. U. 2013. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Sistem Pengukuran Kinerja Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sinjai. *Skripsi*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Hasanuddin.
- Ombudsman Republik Indonesia. 2016. *Peraturan Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik*. www.ombudsman.go.id (diakses pada 20 Februari 2019).
- Rangkuti, M H B. 2018. Akuntabilitas Kinerja Di Instansi Pemerintah. *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik* , Vol 8 No 2.
- Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Silvia. 2013. Pengaruh Keterbatasan Sistem Informasi, Komitmen Manajemen dan Otoritas Pengambilan Keputusan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Skripsi*, Fakultas Ekonomi, Universitas Padang.
- Wahyudi. 2017. Manajemen Konflik Dan Stres Dalam Organisasi. Bandung: CV Alfabeta.**
- 2 OPD Masuk Zona Merah Ombudsman, Begini Respon Firdaus. Aprianto, Kholik.14 Desember 2017. Diakses 15 Desember 2018, 11.00. <[www. Cakaplah.com](http://www.Cakaplah.com)>